

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Partai politik merupakan organisasi politik yang memiliki ideologi dan cita-cita tertentu yang ingin diraih secara bersama-sama dan memiliki tujuan untuk merebut dan atau mempertahankan kekuasaan. Dalam merebut atau mempertahankan kekuasaan dapat dilakukan melalui suatu kontestasi politik seperti Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) baik Pemilihan Gubernur, Walikota ataupun Bupati. Untuk menghadapi dan memenangkan kontestasi politik yakni memperoleh dukungan mayoritas dari pemilih, maka para kontestan harus mampu menarik hati pemilih, berpihak dan memberikan suaranya. Lantas, bagaimana kontestan bisa memperoleh dukungan suara terbanyak dari pemilih? Bagaimana pula metode dan teknik yang harus digunakan dalam memperoleh dukungan suara terbanyak tersebut?

Idealnya dalam meraih suara terbanyak pemilih, para kontestan perlu melakukan kajian dan penyusunan perencanaan yang cermat atau yang biasa kita sebut “strategi”. Schroeder (2010, hlm. 26) dalam bukunya yang berjudul *Strategi Politik*, mendefinisikan bahwa “Strategi politik adalah strategi yang digunakan untuk merealisasikan cita-cita politik”. Cita-cita suatu partai dalam kontestasi politik ialah kemenangan dalam arti memperoleh suara terbanyak pemilih. Gambaran yang jelas tentang tujuan akhir dan pengambilan tiap keputusan politik dilakukan dengan menganalisa segala potensi yang dimiliki, kelemahan yang ada, peluang yang mungkin bisa diperoleh, dan ancaman yang akan ditemui. Bagaimana kekuatan yang dimiliki mampu mengambil keuntungan dari peluang yang ada. Bagaimana mengatasi kelemahan yang ada agar tak menghambat keuntungan yang akan didapat. Bagaimana kekuatan yang dimiliki mampu menghadapi ancaman yang ditemui. Bagaimana pula mengatasi kelemahan yang ada agar tak menjadi ancaman yang baru. Mengapa ini harus dilakukan? Sebab, lawan politik pun pasti menyusun strategi dan melakukan berbagai upaya untuk memenangkan kontestasi politik tersebut. Tinjauan strategi politik (Firmanzah, 2011; Schroeder, 2010) dapat dilihat dari bagaimana strategi komunikasi politik (Nimmo, 2005, 2010; Arifin, 2011), strategi kampanye (Schroeder, 2010; Venus, 2009) ataupun *Marketing Mix*

politik (Firmanzah, 2008) yang dijalankan. Dengan perencanaan yang cermat dan dijalankan secara baik, tepat sasaran dan efektif, maka peluang kemenangan bisa diperoleh.

Pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023 mulai ditabuh, perhelatan politik suksesi kepemimpinan Pemilukada Serentak tahun 2018 semakin memanas. Banyak calon yang masuk dalam bursa kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur pada kontestasi yang akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018 mendatang. Merujuk pada Pasal 109 ayat (1), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, bahwa “Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih”. Adapun Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilgub Jabar 2018 ialah 31.730.042 pemilih yang tersebar di 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Masalahnya, Pemilihan Gubernur secara langsung oleh masyarakat bisa dikatakan sebagai masa kelam bagi Partai Golkar di Provinsi Jawa Barat. Bagaimana tidak, sejak tahun 2008 Partai Golkar selalu gagal merebut kursi orang nomor satu di Jawa Barat. Padahal pada masa pemilihan tidak langsung, partai dengan lambang beringin selalu menduduki orang nomor satu, misalnya sosok R. Nuriana yang menjabat sejak 1998-2003, yang digantikan oleh Danny Setiawan sampai 2008. Menyongsong Pilgub Jabar 2018, Golkar kembali melempar dadu, sosok Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Jawa Barat, yakni Dedi Mulyadi disodorkan untuk dipilih oleh masyarakat Jawa Barat. Kekalahan demi kekalahan selama 2 periode pemilihan (2008-2018) dianggap menjadi pelajaran berharga, bahkan cambuk bagi Partai Golkar.

Sebagai kader partai, sosok Dedi Mulyadi mengalami tarik ulur dukungan oleh internal Partai Golkar. Pada mulanya beliau tidak didukung oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, malah Golkar mendukung diluar kadernya. Namun setelah pergantian nahkoda baru DPP Partai Golkar, dan aspirasi dari 27 DPD Kabupaten/Kota Partai Golkar se-Jawa Barat, akhirnya beliau kembali diusung untuk maju dalam kontestasi Pilgub Jabar 2018. Hal ini dianggap sebagai

inkonsistensi dalam memantapkan kelembagaan partai antara pusat dan daerah. Sebagaimana pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjend) Golkar, Idrus Marham yang diutarakannya menyusul evaluasi dukungan kepada non-kader Partai Golkar (yang dimuat *metrotvnews.com*), “prinsip Partai Golkar mengedepankan kader dan mengedepankan pengurus...”

Sebagaimana yang tertuang pada Pasal 1 poin 18 dan 19, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa pasangan calon dapat diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik atau perseorangan yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta pemilihan. Lebih lanjut, pada pasal 5 Ayat (2) menyebutkan bahwa, “partai politik atau gabungan partai politik bisa mencalonkan jika punya paling sedikit 20% kursi di DPRD, atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah di pileg terakhir”. Merujuk pada hasil Pemilihan Legislatif tahun 2014 (diakses dari *dprd.jabarprov.go.id*) menunjukkan bahwa total raihan kursi DPRD Prov. Jabar sebanyak 100 kursi yang terdiri atas PDIP 20 kursi, Golkar 17 kursi, PKS 12 kursi, Demokrat 12 kursi, Gerindra 11 kursi, PPP 9 kursi, PKB 7 kursi, Nasdem 5 kursi, PAN 4 kursi, Hanura 3 kursi. Berdasarkan hasil tersebut, maka hanya PDIP yang memenuhi syarat untuk mengajukan Cagub dan Cawagub secara langsung, sedang yang lainnya harus melakukan koalisi partai. Partai Golkar tidak dapat mengusung calon atau pasangan calonnya sendiri, sebab raihan kursi hanya 17 kursi dari 100 kursi, atau kurang dari 20% total kursi DPRD Prov. Jawa Barat. Oleh karenanya, maka Partai Golkar harus melakukan koalisi dengan partai lain.

Dalam rangka mencari dan membuka peluang mitra koalisi dan proses kandidasi pasangan Cagub dan Cawagub, DPD I Partai Golkar Jawa Barat membuka komunikasi politik dengan berbagai partai. Menurut Dedi Mulyadi (pada portal berita *partaigolkar.or.id*) mengungkapkan “...setiap hari selalu ada komunikasi antar sesama pengurus dan partai lainnya. Termasuk saat menjelang pendaftaran.” Disamping itu, DPD I Partai Golkar Provinsi Jawa Barat selalu mempelajari hasil survei internal dan independen. “Survei itu sebagai alat bantu ukur kami (Partai Golkar). Hasilnya memang belum dipublikasikan tapi kami tentu

harus tahu baiknya dari sisi mana dan kurangnya dari sisi mana. Survei itu bukan hanya dari internal namun juga memerlukan pembanding”, ungkap MQ. Iswara (dalam *sp.beritasatu.com*).

Menjelang pendaftaran pasangan Cagub dan Cawagub ke KPU Provinsi Jawa Barat, penajakan sesama partai untuk berkoalisi semakin dinamis dan intens. Kini teka-teki petarung pada Pilgub Jabar tahun 2018 terpetakan, ada 4 pasang yang muncul kepermukaan, yakni: Deddy Mizwar–Dedi Mulyadi (Golkar–Demokrat dengan total 29 kursi), Ridwan Kamil–Uu Ruzhanul Ulum (Nasdem–PKB–PPP–Hanura dengan total 24 kursi), Sudrajat–Ahmad Syaikh (Gerindra–PKS–PAN dengan total 27 kursi), dan Tubagus Hasanuddin–Anton Charliyan (PDI-P dengan total 20 kursi) (dimuat pada laman <http://id.wikipedia.org>).

Banyak pengamat dan tokoh masyarakat memprediksi bahwa hanya pasangan Ridwan Kamil–Uu Ruzhanul Ulum dan Deddy Mizwar–Dedi Mulyadi yang akan bersaing ketat. Dengan begitu adanya fokus perhatian lebih pada kedua kontestan tersebut. Hal ini merujuk pada beberapa hasil lembaga survei (seperti Lembaga Survei *Poltracking* Indonesia, Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Indo Barometer) yang menunjukkan bahwa elektabilitas dan popularitas Ridwan Kamil, Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi menduduki peringkat 3 teratas. Ketokohan dan lembaga politik yang mendukung kandidat kader koalisi Partai Golkar dan Demokrat sangat menentukan berhasil atau tidaknya strategi politik yang dibangun dalam memenangkan kontestasi Pilgub Jabar 2018, apalagi didukung dengan segala potensi yang dimiliki.

Ada beberapa hal yang menarik untuk kita tinjau. *Pertama*, merujuk pada pendapat Suryadi (2017), pada kolom mingguan *pikiran-rakyat.com* yang berjudul *Golden Globe*, bahwa:

Terdapat 3 alasan mengapa pemilihan umum di Jawa Barat dipandang sebagai instrumen penting politik elektoral pada skala nasional yakni pertama hasil pemilu Jawa Barat adalah prediktor pemenang pemilu tingkat nasional. Berkaca pada hasil pemilu 2014, 3 besar peraih suara di Jawa Barat sama persis dengan pengumpul suara tingkat nasional, yakni PDIP, Golkar, dan Gerindra. Kedua, secara kuantitas Jabar menyumbang sekitar 16% pada raihan suara pemilu nasional. Terakhir, Jabar adalah pasar politik terbuka yang kompetitif. Wajar jika ditandai sebagai daerah pemilihan yang strategis.

Kedua, Partai Golkar merupakan salah satu partai yang besar dan mapan dalam kancah perpolitikan nasional, pun lingkup Jawa Barat. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Muchtar (2013) bahwa:

Sebagai partai tua yang sudah cukup mapan, Partai Golkar memiliki beberapa potensi kekuatan untuk memenangkan baik dalam Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) maupun Pemilihan Umum mendatang, potensi-potensi itu adalah paradigma baru sebagai pedoman dalam interaksi politik, kekuatan infrastruktur dan hasil survei dari berbagai lembaga.

Ketiga, terjadinya kekisruhan yang dialami internal partai pun juga pergantian Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar beberapa waktu lalu mampu diatasi dengan baik. Dengan merawat ketokohan dan memantapkan kelembagaan partai telah merubah konstelasi politik yang ada.

Keempat, strategi politik ialah langkah krusial yang memerlukan penanganan secara hati-hati, dimana menarik perhatian dan suara dari pemilih dipertaruhkan. Dengan terbatasnya waktu kampanye yang disediakan oleh KPU, memaksa tiap kandidat untuk merencanakan strategi politik yang baik, tepat sasaran, dan efektif untuk mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Jawa Barat.

Tentunya persaingan politik hanya akan dapat dimenangkan apabila ada dukungan dan keberpihakan politik dari masyarakat. Kemenangan tidak akan diperoleh apabila partai tidak secara konsisten dan terus-menerus menunjukkan kepeduliannya terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat. Jika penetapan strategi salah, maka jalan yang ditempuh untuk mencapai tujuan bisa gagal, bahkan yang dialami adalah kerugian dari segi waktu, materi dan tenaga. Lalu, bagaimana dengan Partai Golkar dalam memformulasikan perencanaan strategi politiknya? Bagaimana pelaksanaan strategi politik agar mampu berjalan dengan baik, tepat sasaran, dan efektif? Bagaimana pula hambatan yang dihadapinya? Serta, bagaimana hasil dari strategi politik yang dijalankan dalam pemenangan Pilgub Jabar tahun 2018 tersebut? Apakah strategi politik yang telah diformulasikan oleh Partai Golkar akan membawa pada kemenangan dalam kontestasi politik ataukah sebaliknya?

Politik itu dinamis, kita tak dapat menampik dengan adanya berbagai dinamika yang terjadi. Dengan demikian, tentunya jajaran pengurus khususnya tim

pemenangan telah merencanakan dan melakukan strategi politik yang baik, tepat sasaran dan efektif untuk merealisasikan cita-cita politik memenangkan Pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Barat tahun 2018. Atas dasar pemikiran tersebut, maka peneliti memiliki hasrat untuk meneliti tentang bagaimana *“Strategi Politik Partai Golkar Dalam Pemenangan Pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Barat (Pilgub Jabar) Tahun 2018 (Studi Deskriptif Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Provinsi Jawa Barat)”*.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis membuat beberapa rumusan masalah penelitian agar terarah serta sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan. Adapun rumusan masalah penelitian, ialah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana perencanaan strategi politik yang bersifat internal dan eksternal DPD I Partai Golkar dalam pemenangan Pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Barat (Pilgub Jabar) tahun 2018?
- 2) Bagaimana pelaksanaan strategi politik yang bersifat internal dan eksternal DPD I Partai Golkar dalam pemenangan Pemilihan Provinsi Jawa Barat (Pilgub Jabar) tahun 2018?
- 3) Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan strategi politik yang bersifat internal dan eksternal DPD I Partai Golkar dalam pemenangan Pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Barat (Pilgub Jabar) tahun 2018?
- 4) Bagaimana hasil strategi politik yang bersifat internal dan eksternal DPD I Partai Golkar dalam pemenangan Pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Barat (Pilgub) tahun 2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui bagaimana strategi politik yang bersifat internal dan eksternal Partai Golkar dalam pemenangan Pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Barat (Pilgub Jabar) tahun 2018.

1.3.2 Tujuan Khusus

- 1) Untuk mengetahui bagaimana perencanaan strategi politik yang bersifat internal dan eksternal DPD I Partai Golkar dalam kemenangan Pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Barat (Pilgub Jabar) tahun 2018.
- 2) Untuk memahami bagaimana pelaksanaan strategi politik yang bersifat internal dan eksternal DPD I Partai Golkar dalam kemenangan Pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Barat (Pilgub Jabar) tahun 2018.
- 3) Untuk memahami bagaimana hambatan dalam menyelenggarakan strategi politik yang bersifat internal dan eksternal DPD I Partai Golkar dalam kemenangan Pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Barat (Pilgub Jabar) tahun 2018.
- 4) Untuk mengetahui bagaimana hasil strategi politik yang bersifat internal dan eksternal DPD I Partai Golkar dalam kemenangan Pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Barat (Pilgub Jabar) tahun 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Segi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan untuk memperluas pengetahuan, wawasan berpikir serta meningkatkan pemahaman yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yakni bagaimana strategi politik yang bersifat internal dan eksternal suatu partai politik dalam kemenangan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Berdasarkan tinjauan pada proses perencanaan (Analisis SWOT), pelaksanaan (strategi internal dan eksternal), hambatan yang dihadapi (faktor ekonomi dan sosio-politis), dan hasil dari strategi politik yang telah dijalankan. Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi peneliti yang berminat untuk melakukan penelitian dibidang studi ilmu politik dan pendidikan kewarganegaraan, terutama dalam konteks kajian partai politik dan pemilihan umum, khususnya bagaimana strategi politik partai politik dalam kemenangan suatu kontestasi politik (Pemilukada).

2) Segi Praksis

Sebagai bahan masukan, rujukan dan saran bagi Praktisi Partai Politik khususnya Tim Pemenangan dalam mendesain strategi politik dalam kemenangan

Pemilukada. Dimana dengan memformulasikan perencanaan dengan pola analisis SWOT yang cermat dan teliti, menjalankannya berbagai strategi politik yang bersifat internal dan eksternal. Strategi politik erat kaitannya dengan strategi komunikasi politik yakni bagaimana merawat ketokohan dan memantapkan kelembagaan partai, bagaimana membangun koalisi, serta melakukan kampanye dan *marketing* politik sesuai dengan pedoman organisasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Strategi politik yang dilaksanakan harus memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhinya baik dari segi ekonomi maupun sosio-politis, sebagai upaya untuk memperoleh peningkatan elektabilitas dan mencapai target kemenangan dalam kontestasi politik. Perencanaan yang cermat dan dijalankan dengan baik, tepat sasaran dan efektif, maka peluang kemenangan bisa diperoleh.

3) Segi Kebijakan

Mewujudkan Pemilukada Serentak 2018 yang Luber-Jurdil (Luas, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil). Dimana, partai politik dalam melaksanakan tahapan, program, jadwal, proses pencalonan, dan kegiatan kampanye Pemilukada sesuai dengan mekanisme internal partai dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pun juga, bagaimana para penyelenggara pemilu untuk senantiasa menjaga integritas, profesionalitas, dan independensi dalam menunaikan tugasnya, demi terwujudnya keadilan dalam pesta demokrasi.

4) Segi Isu Dan Aksi Sosial

Sebagai upaya untuk mendukung tema dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 yang digaungkan KPU Provinsi Jawa Barat, bahwa “Pilgub Jabar 2018 sebagai sarana edukasi demokrasi dan wahana wisata politik untuk masyarakat Jawa Barat, rakyat Indonesia, bahkan warga dunia”. Pesta demokrasi sebagai momentum membangun *lemah cai* dengan semangat *silih asah, asih, asuh* mewujudkan Jawa Barat yang *gemah ripah repeh rapih*. Pun juga, dukungan atas gerakan yang diinisiasi oleh penyelenggara pemilu melalui “Gerakan Sadar Pemilu” sebagai upaya untuk membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilu dan meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi.